

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara monarki dengan pemerintahan dibawah Sunnah atau aturan islam, dimana semua peraturan maupun kebijakan di nagara Arab Saudi harus berdasarkan syariat karena Arab Saudi menerapkan Quran dan Sunnah sebagai konstitusinya. Oleh sebab itu, negara Arab Saudi dikenal sebagai negara yang konservatif, yang menurut umat islam dan masyarakat arab saudi berarti hidup sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti Sunnah. Selain itu, konservatisme berarti mengikuti dan mengamalkan aturan Islam yang menekankan peran orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka pada nilai-nilai dan moral keluarga (Ireiqat, 2015).

Negara dengan penduduk lebih dari 30 juta jiwa tersebut dipimpin oleh Raja Salman, yang kemudian Raja Salman menunjuk anak sulungnya dari istri ketiga, Mohammed bin Salman sebagai menteri pertahanan pada Januari 2015, Mohammed bin Salman (MBS) telah mengumpulkan kekuasaan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Saudi modern, pertama sebagai Wakil Putra Mahkota dari April 2015 dan kemudian sebagai Putra Mahkota dari Juni 2017. MBS memanfaatkan dukungan ayahnya dan meninggalnya tokoh senior Al Saud untuk memperkuat kontrolnya atas kebijakan pertahanan, ekonomi, dan minyak melalui pembentukan Presidensi Keamanan Negara dan Komite Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dan restrukturisasi Pengaturan pemerintahan Saudi Aramco (Coates Ulrichsen & R. Sheline, 2019). Kemunculan Muhammed Bin Salman atau biasa disebut dengan MBS membawa

berbagai perubahan di kancah dunia dan telah mengubah profil Arab Saudi di mata Internasional (IISS, 2018).

Mohammed bin Salam akan mengatur agenda di Arab Saudi beberapa dekade mendatang yang akan terjadi perubahan dan transformasi yang drastis dalam aspek sosial dan budaya masyarakat. Meski demikian, telah ada tuntutan reformasi sosial seperti sekarang yang diinginkan masyarakat untuk membangun Arab Saudi yang lebih Modern. Mohammed bin Salman menganggap dirinya sebagai corong generasi muda dan hingga saat ini perubahan di Arab Saudi disambut baik (Bari, 2019). Terpilih Mohammed bin Salam ini membuat transisi atau proses transformasi Arab Saudi yang cukup signifikan di kawasan Timur Tengah yang membuat citra Arab Saudi lebih modern dan membuat masyarakat Arab Saudi yang sebelumnya dipandang sebagai masyarakat yang konservatif secara umum sekarang sedikit berubah menjadi lebih liberal dibandingkan Arab Saudi beberapa dekade sebelumnya.

Selain itu, Mohammed bin Salman dalam melakukan liberalisasi dalam bidang sosial budaya dan kesetaraan gender juga dibantu dalam kebijakannya didalam Visi 2030 Arab Saudi yang dipromosikan kepada masyarakat Arab dan dunia. Dalam Visi 2030 tersebut terdapat beberapa kebijakan yang direncanakan oleh Mohammed bin Salman dalam perannya sebagai Putra Mahkota untuk masa depan Arab Saudi (Moshashai et al., 2020). Visi 2030 ini adalah kebijakan dalam langkah Arab Saudi untuk mengubah wilayah negaranya menjadi lebih modern sesuai dengan transformasi sosial budaya yang dilakukan Mohammed bin Salman. Selain itu, kebijakan ini dibuat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja sektor swasta dan mengembangkan ekonomi non-minyak, dan untuk mengembangkan layanan umum seperti kesehatan, maupun pariwisata yang dapat membawa perubahan pada kehidupan sosial budaya di Arab Saudi (Khan, 2016).

Strategi transformasi Mohammed bin Salman tidak terlepas dari beberapa tantangan, salah satunya terkait paham Wahabi yang terkesan kaku, dan tertutup terhadap modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Paham Wahabi sendiri dinilai tidak sesuai dengan tujuan-tujuan strategi reformasi yang dilakukan Mohammed bin Salman dan dinilai tidak akan sesuai dengan aturan reformasi Arab Saudi karena sangat bersimpangan dengan ajaran dan nilai-nilai yang diterapkan paham Wahabisme. Selain itu, tantangan lain juga muncul dari keluarga kerajaan yang menganggap pengangkatan Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota terlalu gegabah dan dinilai belum memiliki cukup pengalaman dalam kepemimpinan.

Meskipun demikian, perubahan yang dibawa oleh Mohammed bin Salman juga termasuk dalam perubahan mengenai kesetaraan gender. Isu Kesetaraan Gender telah menjadi isu yang sering dibahas dalam forum Internasional yang kemudian kembali menyinggung beberapa negara yang rendah akan kesetaraan gender, seperti Arab Saudi. Budaya Patriarki di Arab Saudi masih terbilang begitu kuat, saat dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai hak-hak perempuan yaitu kebijakan resmi untuk mengizinkan perempuan untuk mengemudi terjadi penolakan dari kaum laki-laki yang menyuarakan penolakan ini melalui media sosial (Dewi et al., 2020). Kurangnya empati terhadap kesetaraan gender di Arab Saudi ini juga terlihat dari peluang yang tersedia untuk pembangunan, pendidikan, maupun kesehatan. Ini terlihat dalam kekerasan dan ketidakterlihatan secara umum pekerjaan perempuan seperti yang akan kita lihat nanti.

Masalah ini sangat kontroversial dan banyak dibahas oleh organisasi feminis dan hak asasi manusia di kawasan Arab, bahkan media Barat dan publik menstereotipkan perempuan Muslim Arab sebagai “miskin dan tertindas” (Kostenko et al., 2016) Selain itu, budaya di Arab Saudi mempunyai kepercayaan kuat terhadap kehormatan keluarga,

karena dalam memilih pekerjaannya seorang perempuan harus dengan persetujuan wali mereka untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti bepergian dan menandatangani kontrak kerja. Tradisi konservatif sosial membentuk penghalang bagi partisipasi tenaga kerja perempuan dan menghalangi kesetaraan upah dan peluang pengembangan karir. Isu hak-hak perempuan muslim di Arab Saudi telah menjadi pembahasan selama bertahun-tahun, namun perempuan masih kekurangan keterwakilan yang memadai di ranah sosial dan politik (Esquivel, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Mohammed bin Salman dalam melakukan transformasi sosial budaya dan kesetaraan gender di negara Arab Saudi?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Teori Kesetaraan Gender

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kesetaraan Gender untuk dapat menganalisa lebih lanjut bagaimana teori tersebut memberikan pengaruh dan dampak terhadap perubahan budaya di negara Arab Saudi. Lebih lanjut, Kesetaraan Gender merupakan teori yang sedang berkembang dalam Teori Hubungan Internasional saat ini (Bonvillian, 2007). Kesetaraan gender mengacu pada hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan keinginan ataupun kemampuan individu mereka tanpa dibatasi oleh prasangka atau peran gender yang kaku (Qomariah, 2019). Kesetaraan gender yang juga merupakan salah satu poin penting dari hak asasi manusia tidak terlepas dari masalah utama kesetaraan gender itu sendiri

yang banyak menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.

Walaupun berbagai perlindungan hingga konvensi Internasional telah diupayakan untuk bentuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, namun masih terdapat hambatan dalam upaya mencapai kesetaraan gender (Audina, 2021). Selain itu, Ilmuwan sosial telah menilai bahwa perubahan dramatis dalam ketidaksetaraan gender dalam setengah abad terakhir, terkadang disebut sebagai “revolusi gender” (England et al., 2020). Oleh sebab itu, dalam mencapai hak kesetaraan gender, masih terdapat beberapa isu maupun persoalan baik itu dalam intitusi juga dalam faktor sosial budaya, seperti kurangnya konsensus antara pekerja perempuan dan pengusaha tentang kesetaraan gender di tempat kerja, legislasi kesetaraan gender masih belum dilaksanakan secara optimal dan rendahnya kesadaran para pekerja terhadap hak mereka, dan kurangnya juga posisi pekerjaan untuk perempuan.

Oleh sebab itu, pemerintah bisa diharapkan untuk bisa mencapai hak kesetaraan gender dengan meningkatkan aturan maupun penegakan hukum yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender baik itu di bidang sosial maupun juga ketenagakerjaan dengan turut melibatkan antara pihak pemerintah pusat dan juga daerah untuk memperkuat dan ketegasan dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan. Disamping itu, perlu juga untuk meningkatkan rasa kesadaran mengenai isu atau hak kesetaraan gender angkatan kerja perempuan juga bisa memberikan rasa aman dengan aturan perlindungan sosial untuk pekerja perempuan dalam sektor informal.

1.3.2 Teori Perubahan Sosial Budaya

Dalam menyusun penelitian ini, penulis juga menggunakan Teori Perubahan Sosial Budaya untuk dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di suatu wilayah atau negara dalam aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Teori Perubahan Sosial Budaya ditafsirkan luas oleh para ahli, Roscoe Pound seorang advokat ahli sejarah mengemukakan bahwa perubahan sosial termasuk dalam hukum dimana hukum bisa menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal atau dikenal dengan "*Law as a tool of social engineering*". Teori perubahan sosial budaya juga memberikan pandangan untuk melihat bagaimana perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Dalam teori perubahan sosial budaya biasa digunakan untuk mengetahui seberapa besar terjadinya dampak pada suatu wilayah atau daerah pada sistem sosialnya maupun budayanya. Perubahan pada sosial budaya ini merupakan lahirnya pola budaya maupun tindakan sosial yang cenderung berbeda dari budaya yang ada sebelumnya, hasil dari kebiasaan dan pola budaya yang baru inilah yang kemudian menjadi semacam akulturasi dan asimilasi, meskipun karakteristik budaya lokal tidak hilang sepenuhnya tetapi ia telah mengalami semacam pembaruan secara sosial (Yoga, 2018). Perubahan sosial budaya merupakan gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan fenomena umum yang terjadi setiap saat di setiap masyarakat. Perubahan terjadi secara alami dan merupakan hal mendasar bagi orang yang selalu menginginkan perubahan (Baharuddin, 2015).

1.4 Hipotesis

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mohammed Bin Salman yang diangkat menjadi Putra Mahkota menggunakan wewenangnya untuk membuat peraturan hukum sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan memodernisasi kehidupan masyarakat Arab Saudi dari sebelumnya.
2. Diterapkan Visi Saudi 2030 yang merupakan kebijakan untuk membangun Arab Saudi yang lebih terbuka dengan dunia luar dan negara yang lebih maju termasuk kebijakan mengenai hak hak gender.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi yang berjudul "Strategi Mohammed bin Salm Terhadap Perubahan Sosial Budaya dan Kesetaraan Gender di Negara Arab Saudi" memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang tertera yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota dan perubahan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya serta pengaruhnya terhadap kesetaraan gender di Arab Saudi.

1.6 Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang dimana menjelaskan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana strategi Mohammed Bin Salman dalam menjalankan perannya sebagai menteri pertahanan dan putra mahkota yang berdampak pada perubahan sosial budaya serta kesetaraan gender di Arab Saudi.

Selain itu, akan membahas juga tujuan dan kebijakan Arab Saudi dibawah Mohammed bin Salman mengenai kesetaraan gender dalam dekade terakhir yang telah diperebutkan di seluruh dunia, misalnya, melalui kebangkitan Hak Global dengan dinamika yang berbeda di seluruh konteks geografis dan ekonomi (Elomäki & Ylöstalo, 2021). Dalam menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang awal mula kebijakan Mohammed bin Salman meluas dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat di Arab Saudi. Selain itu juga diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana langkah langkah yang diambil Arab Saudi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut sehingga bisa diterima baik oleh yang membuat adanya perubahan dalam struktur sosial maupun budaya.

1.7 Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, maka penulis menetapkan batasan lingkup penelitian kepada perubahan Sosial Budaya dan kesetaraan gender di Arab Saudi yang dipengaruhi oleh kebijakan Mohammed Bin Salman. Dengan kata lain, penelitian ini akan berfokus pada Arab Saudi dengan berbagai perubahan pada bidang kehidupan didalamnya. Penulis akan mengarahkan penelitian ini pada apa saja faktor yang membawa perubahan itu dan kondisi Arab Saudi sebelum dan saat Arab Saudi dibawah kebijakan Mohammed bin Salman serta dampaknya terhadap kehidupan maupun kebijakan pemerintah. Adapun penulis menetapkan jangkauan penelitian agar penulisan tidak terlalu melebar yakni data yang diambil dari tahun 2015 sampai tahun 2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan yang akan ditampilkan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB 1 berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kondisi Sistem Pemerintahan dan Dinamika Sosial Budaya dan Kesenjangan Gender di Arab Saudi

Bab ini berisi tentang dinamika kondisi sosial budaya dan kesetaraan gender yang terjadi di Arab Saudi sebelum masuknya berbagai kebijakan dibawah Mohammed bin Salman sebagai menteri pertahanan dan juga wakil putra mahkota. Selain itu juga akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Arab Saudi serta mengenai beberapa kebijakan yang diterapkan di Arab Saudi yang berdampak pada terhambatnya proses perubahan sosial budaya maupun kesetaraan gender sebelum reformasi Mohammed bin Salman.

BAB III : Strategi Transformasi Sosial Budaya dan Kesenjangan Gender Mohammed bin Salman

Bab ini berisi tentang bagaimana sistem pemerintahan di Arab Saudi dibawah Mohammed bin Salman dapat merubah berbagai struktur kehidupan di Arab Saudi. Beberapa dari kebijakan yang dikeluarkan Mohammed bin Salman juga sempat mencuri perhatian dunia karena dampaknya yang sangat besar dalam perubahan

kehidupan di Arab Saudi. Selain itu, akan membahas mengenai tantangan Mohammed bin Salman dalam menjalankan strategi kebijakan transformasi sosial budaya dan kesetaraan gender di Arab Saudi. Dalam Bab ini juga akan membahas mengenai kehidupan di Arab Saudi baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi sesudah kepemimpinan Mohammed bin Salman.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan pada Bab yang dijelaskan sebelumnya disertai dengan kritik dan saran bagi Pemerintahan Arab Saudi dibawah Mohammed bin Salman dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, maupun politik yang berdampak pada perubahan bidang-bidang kehidupan di Arab Saudi.